

ABSTRAK

PERAN BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN

Oleh

MARLINE ANGGELINATAN INDRA

Terdapat kesenjangan antara jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Bagian Fasilitas Aspirasi, Hubungan Masyarakat, dan Protokol dengan realitas pegawai yang ada, di mana jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak 33 orang sedangkan realitas pegawai sebanyak 21 orang. Kinerja pegawai yang masih kurang optimal dan maksimal dilihat dari hasil evaluasi pencapaian target kinerja Sekretariat DPRD Pprovinsi Lampung mendapat penghargaan dengan nilai 68,00 (Baik) yang diperoleh oleh Inspek Inspektorat Provinsi Lampung, didukung dengan salah satu bukti tampilan *website* DPRD Provinsi Lampung yang kurang *up-to-date* tertanggal 21 Februari 2023 dalam mempublikasikan kegiatan DPRD Provinsi Lampung. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami peran bagian Hubungan Masyarakat DPRD Provinsi Lampung dalam mendukung fungsi pengawasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ialah metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif yang menggunakan teori Peran Hubungan Masyarakat (Cutlip, et.al, 2009:46) dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang menggunakan empat indikator yang menjadi penentu hasil penelitian yaitu: (1) peran Humas sebagai fasilitator komunikasi; (2) peran Humas sebagai fasilitator proses pemecahan masalah; dan (3) peran Humas sebagai teknisi komunikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Humas DPRD Provinsi Lampung sudah maksimal ditunjukkan dengan, (1) peran Humas sebagai fasilitator komunikasi dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan dapat dilihat dari proses fasilitasi dan koordinasi kegiatan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Lampung guna menjaga komunikasi dua arah; (2) peran Humas sebagai fasilitator proses pemecahan masalah dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan dapat dilihat dari kemampuan Humas memfasilitasi pelayanan *problem solving* dengan menyediakan *platform* dalam memberikan pengaduan kepada DPRD Provinsi Lampung; (3) peran Humas sebagai teknisi komunikasi dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan dapat dilihat dari kemampuan Humas mengembangkan sistem teknologi dan informasi pembuatan aplikasi dan juga *website* DPRD Provinsi Lampung.

Kata Kunci: Peran, Hubungan Masyarakat, Fungsi Pengawasan

ABSTRACT

THE ROLE OF THE PUBLIC RELATIONS SECTION IN SUPPORTING THE REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL OF LAMPUNG PROVINCE IN IMPLEMENTING ITS SUPERVISORY FUNCTION

By

MARLINE ANGELINATAN INDRA

There is a gap between the number of employees needed in the Aspiration Facilitation, Public Relations and Protocol Section and the reality of existing employees, where the number of employees needed is 33 people while the reality of employees is 21 people. Employee performance is still less than optimal and maximum seen from the results evaluation of the performance target achievement of the Lampung Provincial DPRD Secretariat received an award with a score of 68.00 (Good) which was obtained by the Lampung Provincial Inspectorate Inspector, supported by one of the proofs of the less up-to-date appearance of the Lampung Provincial DPRD website date February 21, 2023 in publishing activities Lampung Province DPRD. The aim of the research is to find out and understand the role of the Public Relations section of the Lampung Province DPRD in supporting the supervisory function. The method used in the research is a qualitative research method with descriptive analysis using the Role of Public Relations Theory (Cutlip, et al, 2009:46) with data collection techniques using observation, interviews, and documentation using four indicators which determine the research results, namely: (1) the role of Public Relations as a communication facilitator; (2) the role of Public Relations as a facilitator of the problem solving process; and (3) the role of Public Relations as a communications technician. The results of this research show that the role of Public Relations of the Lampung Province DPRD has been maximized, as shown by, (1) the role of Public Relations as a communication facilitator in supporting the implementation of the supervisory function can be seen from the process of facilitating and coordinating activities carried out by the Lampung Province DPRD to maintain two-way communication; (2) the role of Public Relations as a facilitator of the problem solving process in supporting the implementation of the supervisory function can be seen from the ability of Public Relations to facilitate problem solving service by providing a platform for submitting complaints to the Lampung Province DPRD; and (3) the role of Public Relations as a communications technician in supporting the implementation of the supervisory function can be seen from the ability of Public Relations to develop technology and information systems for making applications and also the Lampung Province DPRD website.

Keyword: *Role, Public Relations, Supervisory Function*